

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.667797/2020**

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI   |
| 2. Unit Organisasi            | : (08)     | DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  |
| 3. Provinsi                   | : (34)     | SULAWESI BARAT   |
| 4. Kode/Nama Satker           | : (667797) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT                                |
| Sebesar                       | : Rp.      | 195.840.000 ( SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.06 Program Pembentukan Hukum  
013.08.06.5250 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	195.840.000
Rp.	195.840.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	195.840.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                |           |             |
|----------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN MAMUJU | (178) Rp. | 195.840.000 |
|----------------|-----------|-------------|

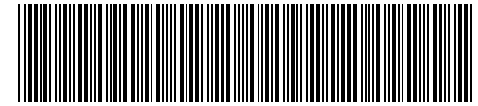
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:1026-5413-2274-3200

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H.  
Bendahara Pengeluaran : Asri, Amd.Kom  
Pejabat Penanda Tangan SPM : Jusman,S.E., M.H.

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			195.840.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			195.840.000
2 Program	013.08.06	Program Pembentukan Hukum			195.840.000
Sasaran Program	01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80	%	
	02	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200	orang	
	03	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
Output Program	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Output Program	01	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80	%	
	02	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200	orang	
	03	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
Kegiatan	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah			195.840.000
Sasaran Kegiatan	01	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah			
	02	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			
Output Kegiatan	5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	23 Raperda		184.375.000
Output Kegiatan	5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	13 Orang		11.465.000

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1026-5413-2274-3200

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT  
Kewenangan : (KD)

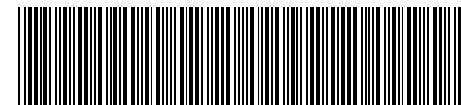
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667797	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	195.840	-	-	-	195.840		
013.08.06	Program Pembentukan Hukum	-	195.840	-	-	-	195.840		
5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	-	195.840	-	-	-	195.840		
5250.001	Fasilitas pembentukan produk hukum daerah	-	184.375	-	-	-	184.375	34 . 51	
01	RM	-	184.375	-	-	-	184.375	178	
5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	-	11.465	-	-	-	11.465	34 . 51	
01	RM	-	11.465	-	-	-	11.465	178	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>195.840</b>	-	-	-	<b>195.840</b>		

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1026-5413-2274-3200

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

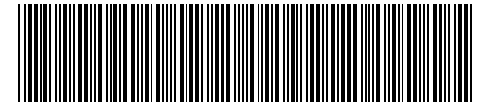
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667797	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	3.917	13.709	17.626	15.667	19.584	19.584	19.584	19.584	13.709	19.584	19.584	13.708	195.840
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	3.917	13.709	17.626	15.667	19.584	19.584	19.584	19.584	13.709	19.584	19.584	13.708	195.840
	013.08.06.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	3.917	13.709	17.626	15.667	19.584	19.584	19.584	19.584	13.709	19.584	19.584	13.708	195.840
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	3.917	13.709	17.626	15.667	19.584	19.584	19.584	19.584	13.709	19.584	19.584	13.708	195.840

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:1026-5413-2274-3200

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT  
Kode dan Nama Satker : [667797] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

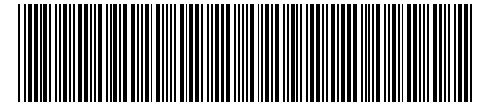
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:1026-5413-2274-3200

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT  
Kode dan Nama Satker : [667797] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001